



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP PUPR 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Trans Sulawesi, Desa Lalow, Kecamatan Lolak

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal.

Laporan ini disusun dengan mendasar pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Bolaang Mongondow atas amanah yang telah diberikan dalam urusan wajib di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow ini menunjukkan gambaran sejauh mana capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

Segala upaya telah kami lakukan dalam menyusun laporan ini, namun masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna menyempurnakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 kami sampaikan untuk diperiksa. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan ini, semoga dapat bermanfaat.

Lolak, Januari 2026

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



SOEHENDRA HAMIN, ST, ME
NIP. 19790515 200212 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	1
B. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. PERENCANAAN STRATEGIS	6
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
1. PENGUKURAN KINERJA	13
i. Metode Pengukuran Kinerja	13
ii. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran	14
2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN	15
3. PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN	40
B. REALISASI ANGGARAN	41
1. ANGGARAN DAN REALISASI APBD	41
2. ANGGARAN DAN REALISASI PER KEGIATAN	42
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

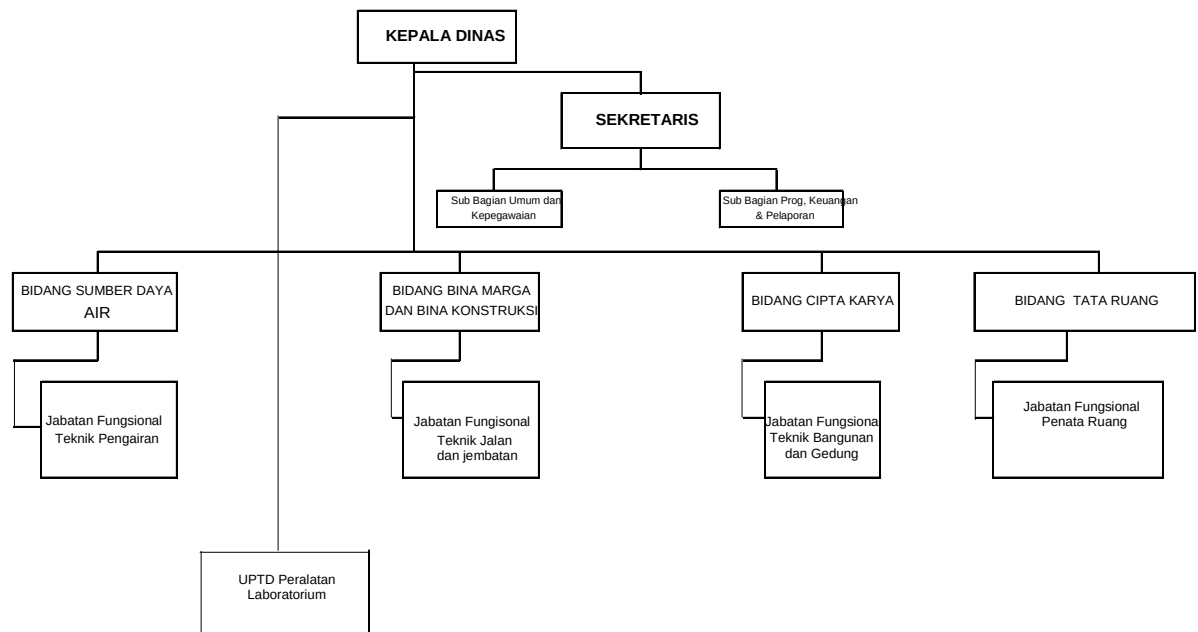
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Bidang Sumber Daya Air
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Cipta Karya
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Bidang Tata Ruang
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- g) UPTD Peralatan dan Laboratorium
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- h) Pejabat Fungsional
 - i. Teknik Pengairan
 - ii. Teknik Tata Bangunan dan Gedung
 - iii. Teknik Jalan dan Jembatan
 - iv. Penata Ruang

Gambar A.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bolaang Mongondow



B. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

- Bidang Sumber Daya Air (SDA)
 1. Masih banyak bendung yang masih bersifat nonteknis
 2. Terbatasnya anggaran dalam pemeliharaan jaringan irigasi pengairan lainnya
 3. Belum optimalnya pengelolaan air dan sumber daya air yang berkelanjutan
 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan bendung dan irigasi di beberapa wilayah.
 5. Pemilik lahan tidak mengizinkan pembangunan bendung atau irigasi melintasi perkebunan pemilik lahan. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian dari pemerintah mulai dari pemerintah tingkat desa, kecamatan sampai pemerintah kabupaten.
- Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi
 1. Masih sebagian kecil ruas jalan kabupaten yang dapat dipelihara untuk mempertahankan jalan dalam kondisi dikarenakan keterbatasan dana.

2. Masih adanya ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak/rusak berat.
3. Belum optimalnya pengembangan di beberapa jaringan infrastruktur jaringan jalan guna mendukung produktifitas bidang pariwisata, pertanian, perkebunan maupun pertambangan, baik yang baru dieksplorasi maupun yang telah dieksploitasi secara tidak langsung ikut mempengaruhi perkembangan jaringan jalan di daerah tersebut.
4. Belum terjaminnya pengguna jalan yang berkendara dalam keadaan nyaman dan selamat akibat kondisi jalan yang rusak.
5. Belum tercapainya kecepatan rencana dalam menempuh perjalanan akibat kondisi jalan yang sempit pada ruas jalan kabupaten.
6. Sistem jaringan jalan Trans Sulawesi telah terintegrasi dengan sistem jaringan jalan Provinsi Sulawesi Utara, namun belum diikuti dengan peningkatan kualitas jalan yang menyebabkan waktu tempuh yang lama dan tidak nyaman serta berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa.
7. Belum optimalnya manajemen konstruksi yang dilakukan oleh pengusaha jasa konstruksi.
8. Belum optimalnya sistem pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.

➤ Bidang Cipta Karya

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar.
2. Sanitasi berupa peningkatan prasarana dan sarana air limbah, dan drainase di kawasan perkotaan dan pedesaan sangat kurang.
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas masyarakat miskin di perkotaan dan pedesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah.
4. Masih terbatasnya infrastruktur penyediaan jaringan air bersih pada masyarakat perkotaan, pedesaan, nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
5. Belum seluruh bangunan gedung negara dikelola dengan benar mengikuti peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi bangunan gedung dan masih banyak bangunan kantor yang berstatus sewa dan tidak layak digunakan sebagai bangunan kantor.

6. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis kerna belum optimalnya mobilitas dengan minimnya sarana dan prasarana. Terbatsnya kegiatan revitalisasi dalam upaya peningkatan vitalitas kawasan pada kawasan strategis cepat tumbuh.
 7. Penyediaan sarana dan prasarana seperti jalan lingkungan dan aksesibilitas lainnya, penyediaan prasarana drainase, air bersih dan sanitasi serta upaya peningkatan kualitas kawasan mencakup landscape, estetika dan ekologi masih belum dapat perhatian.
- Bidang Tata Ruang
1. Belum optimal pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap RTRW Kabupaten.
 2. Belum maksimalnya kegiatan yang berkaitan dengan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan standar pelayanan minimal (SPM) bidang tata ruang.
 3. Perlunya regulasi pendukung sebagai bagian implementasi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten.
- Kesekretariatan
1. Belum sepenuhnya aparat/SDM patuh terhadap perundang – undangan.
 2. Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap mekanisme dan sistem birokrasi yang tercermin dengan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 3. Belum adanya analisis kebutuhan pegawai khususnya dibidang teknik dengan beban pekerjaan konstruksi sehingga mempengaruhi optimalisasi pegawai.
 4. Sistem informasi pendataan pegawai yang belum menggunakan sistem elektronik sehingga sering terjadi keterlambatan dan tidak akuratnya data kepegawaian.
 5. Belum maksimalnya sistem pendataan pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang keteknikan.
 6. keterbatasan dana untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagian program, bagian keuangan dan bidang keteknikan.

➤ UPTD Peralatan dan Laboratorium

1. Kondisi alat berat yang dimiliki sudah berumur lebih dari 20 tahun sehingga sudah tidak produktif lagi dan biaya pemeliharaannya cukup besar.
2. Alat berat tersebut juga menjadi sumber PAD melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten.
3. Kondisi peralatan pengujian yang dimiliki sudah berumur sehingga mempengaruhi tingkat akurasi pemeriksaan.
4. Pemeriksaan laboratorium menjadi sumber PAD melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten.
5. Sistem manajemen peralatannya belum maksimal.
6. Jumlah dan jenis peralatan yang masih kurang.
7. Jumlah tenaga yang bersertifikasi masih sangat kurang.
8. Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Pungutan Retribusi, khususnya retribusi kendaraan/alat – alat berat dan pemakaian laboratorium untuk satu kali pengujian perlu direvisi kembali karena Peraturan Daerah yang dipakai masih Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2001.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pembangunan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dan merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan peningkatan dukungan manajemen diberbagai aspek melalui peningkatan dan pengoptimalan sumber daya yang ada seperti aset daerah, teknologi informasi, keuangan, kelembagaan, dan prasarana dan sarana aparatur daerah, dan lain – lain.

Untuk mewujudkan pembangunan dilingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka disusunlah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026. Maka visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah :

**“Bolaang Mongondow yang Baru, Berbudaya, Berdaya Saing dan Mandiri
Sebagai Lumbung Pangan Indonesia Timur”**

Dalam mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun tersebut dirumuskan melalui 4 misi pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan bolaang mongondow yang berbudaya dan berdaya saing;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumber daya lokal;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan bebas KKN.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2023-2026. Beberapa isu strategi tersebut adalah:

1. Isu – Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

- Pengembangan Sumber daya air baku yang masih cukup besar baik untuk air minum maupun air irigasi;
- Pemanfaatan Jaringan irigasi yang tidak optimal;
- Kawasan rawan banjir akibat luapan air sungai;
- Lokasi Pantai yang rawan abrasi;
- Pembentukan Komisi Irigasi;
- Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Sumber Daya Air.

2. Isu – Isu Strategis Bidang Bina Marga

- Ruas Jalan dengan lebar dan kelandaian yang belum memenuhi standar;
- Masih banyaknya ruas jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat;
- Masih banyak jembatan yang belum dibangun;
- Keterbatasan anggaran untuk pembinaan pelatihan peningkatan skill dan kompetensi tenaga tukang dibidang kontruksi;
- Keterbatasan tenaga tukang yang berserfikasi dan kontraktor masih sering menggunakan tenaga tukang yang tidak profesional;
- Keterbatasan database terkait dengan kebutuhan infrastruktur sehingga mempengaruhi kualitas rencana;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga perencana di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow; dan

3. Isu – Isu Strategis Bidang Cipta Karya

- Penyediaan infrastruktur perkotaan seperti air bersih, sanitasi dan persampahan;
- Penyediaan Prasarana Dasar Permukiman seperti Jalan dan drainase;
- Sosialisasi Regulasi Bangunan Gedung dan RTH;
- Penataan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW

4. Isu – Isu Strategis Bidang Tata Ruang
 - Tidak berimbangnya laju pembangunan dengan pengendalian ruang;
 - Tingginya pertumbuhan permukiman yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah peruntukan ruang sehingga menyebabkan tumbuhnya pemukiman yang tidak layak/kumuh;
 - Alih fungsi lahan yang terjadi tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
5. Isu – Isu Strategis Sekertariat
 - Peningkatan sarana dan prasarana kesekretariatan;
 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kepegawaian;
 - Peningkatan Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; dan
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
6. Isu – Isu Strategis UPTD Laboratorium dan Peralatan
 - Peningkatan sumber daya manusia dan peralatan di UPTD Laboratorium dan Peralatan;
 - Pengadaan alat alat berat dan alat alat laboratorium;

Sedangkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa;
2. Penyediaan air minum melalui pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana air minum;
3. Penyediaan sistem air limbah setempat dan sistem air limbah terpusat;
4. Menyediakan porsi pembagian yang berimbang untuk rekonstruksi, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. Rehabilitasi kondisi jalan dan jembatan melalui pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. Menyediakan tenaga konstruksi yang terampil;
7. Pengendalian kesesuaian tata ruang dengan RTRW;
8. Penyediaan pelayanan administrasi.

Tabel 2.1.
Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPD
Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD

VISI : “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT”			
MISI I: Menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Daerah Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS) / Pantai			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air dan perlindungan daerah aliran sungai	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Pembangunan dan rehabilitasi sarana Dan prasarana jaringan irigasi	Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana melalui operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa
MISI II: Menyelenggarakan dan Mengembangkan Infrastruktur Dasar di Bidang Penyediaan Air Bersih Serta Sanitasi Lingkungan			
Tujuan 2 : Meningkatnya Capaian Universal Acces Dibiidang Air Minum dan Sanitasi	Meningkatnya Layanan air minum	Pembangunan,peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum dikawasan perkotaan dan perdesaan	Penyediaan air minum melalui pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana air minum
	Meningkatnya kualitas layanan Sanitasi	Pembangunan,peningkatan dan rehabilitasi jaringan air limbah dikawasan perkotaan dan perdesaan	Penyediaan sistem air limbah setempat dan sistem air limbah terpusat
MISI III: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Mendorong Kualitas Industri Jasa Konstruksi Dalam Rangka menguatkan Daya Saing Wilayah Dan Mengembangkan Organisasi Dengan Prinsip Good and Clean Governance			
Tujuan 3 : Mewujudkan Penyedia Jasa Konstruksi yang Memadai	Meningkatnya Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga konstruksi	Menyediakan tenaga konstruksi yang terampil
MISI V: Mengendalikan Kebijakan Penataan Ruang Melalui Pengawasan, pembinaan, Penertiban dan Koordinasi Pembangunan Kabupaten			
Tujuan 3 : Optimalisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat Kepatuhan RTRW Kabupaten	Menjamin kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Pengendalian kesesuaian tata ruang dengan RTRW

Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPD Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang

Tujuan :

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2021	Target Indikator Tujuan				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Perlindungan Daerah Aliran Sungai	Persentase Jangkauan Irigasi Terhadap Luas Lahan Persawahan	60,78%	69%	65,78%	70,78%	75,78%	80,78%
2	Meningkatnya Capaian Universal Akses Dibidang Air Minum dan Sanitasi	Angka rata – rata capaian universal akses bidang air minum dan sanitasi	49,34%	53,65%	59,98%	69,98%	79,98%	89,98%
3	Mewujudkan Penyedia Jasa Konstruksi yang Memadai	Persentase penyedia jasa yang terampil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang	Tingkat Kepatuhan RTRW Kabupaten	72,26	65%	73,50%	74%	74,50%	75,00 %

Sasaran :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	80%	70%	82%	84%	86%	88%
2	Meningkatnya Layanan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	68,67%	70,20%	71,70%	73,20%	74,70%	76,20%
3	Meningkatnya kualitas layanan sanitasi	Rata – rata presentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase	47,01%	80%	48,3%	49,5%	50,8%	52,0%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4	Meningkatnya Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan Pengendaliannya sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	72,26%	73%	73.50%	74%	74.50%	75%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPJPD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program Pendukung	Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	86%	➤ Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	➤ Rp2.438.399.526
2	Meningkatnya Layanan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	74,70%	➤ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	➤ Rp2.743.342.493
3	Meningkatnya kualitas layanan sanitasi	Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase	50,8%	➤ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	➤ Rp3.000.920.255
				➤ Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	➤ Rp 100.000.000

4	Meningkatnya Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	100%	➤ Program Pengembangan Jasa Konstruksi	➤ Rp 59.858.490
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan Pengendaliannya sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	75%	➤ Program penyelenggaraan penataan ruang	➤ Rp 383.022.598

Gambaran secara utuh bagaimana Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 tercantum pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi presentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

I. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran Tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator – indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi tata kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

- a) Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b) Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK.)

II. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- | | |
|-----------|-------------------|
| >85 | = Sangat Berhasil |
| 70< X ≤85 | = Berhasil |
| 55< X ≤70 | = Cukup Berhasil |
| ≤55 | = Tidak Berhasil |

Untuk capaian masing – masing indikator kinerja disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata – Rata Data Kelompok**”.Penyimpulan capaian sasar n tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata – rata) skala ordinar dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Kategori Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator Untuk Setiap Kategori X Nilai Mean Setiap Kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	92,5
Berhasil	:	77,5
Cukup Berhasil	:	62,5
Tidak Berhasil	:	27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil**, **berhasil**, **cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian kinerja sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

2.1 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi dengan indikator Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik



Pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator sasaran Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKB = \frac{\text{Jumlah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah total panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100\%$$

$$IKB = \frac{50.066,92}{132.828,38} \times 100\% = 37,69$$

2.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	86	37,69	43,83

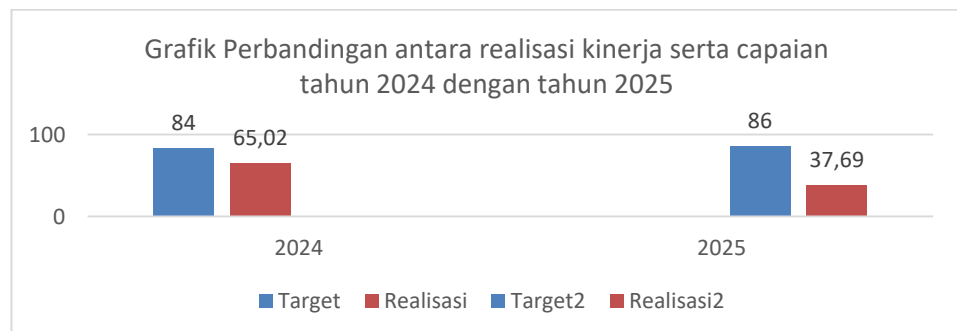
Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik untuk tahun 2025 adalah 37,69% dengan capaian 43,83%. Capaian tahun 2025 menurun dari tahun sebelumnya.



2.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	84	65,02	77,41	86	37,69	43,83

Realisasi kinerja untuk tahun 2025 adalah 37,69% dengan Capaian kinerja 43,83% menurun dari capaian tahun 2024 yaitu 77,41% dengan realisasi kinerja 65,02% hal ini dikarenakan target bertambah sedangkan anggaran untuk program yang menunjang kualitas jaringan irigasi menurun dan juga faktor hidrometeorologi yaitu curah hujan tinggi/ekstrem menyebabkan banjir serta ditambah lagi tanah longsor sehingga membuat kondisi jaringan irigasi banyak yang rusak.



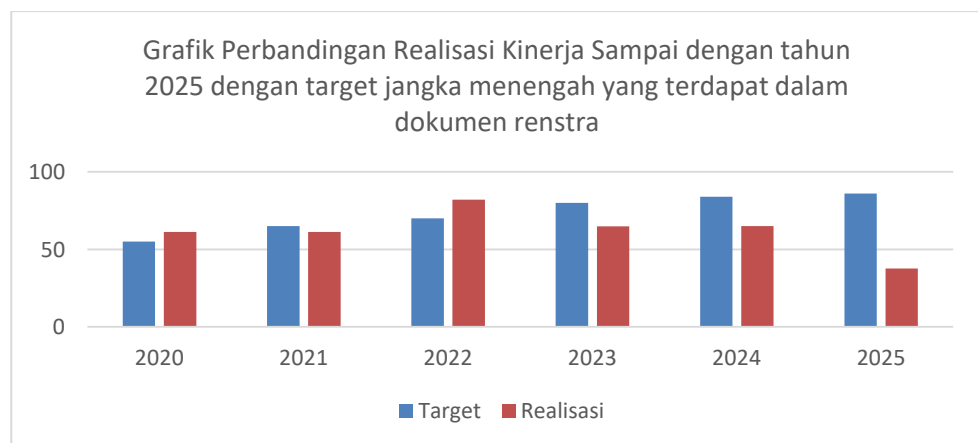
2.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

P Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra	
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	61,26	61,26	81,99	79,01	77,41	86	37,69	43,83	88	42,83

Persentase Indikator sasaran Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Tahun 2025 menunjukkan capaian 43,83%, dibandingkan dengan tahun 2024 capaian indikator Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik mencapai 77,41%, artinya capaian target untuk tahun 2025 menurun dari tahun sebelumnya. Namun capaian kinerja tersebut jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “TIDAK BERHASIL”. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dengan program pendukung yaitu program pengelolaan sumber daya air.

Capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra 2026 mencapai 43,83% untuk Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik. Capaian ini memang tidak memenuhi dengan target awal.



2.1.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Analisis Penyebab Kegagalan

- Dengan keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana dana transfer dari Pemerintah Pusat baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun DAU yang ditentukan penggunaan ditiadakan bahkan Anggaran dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah juga minim dalam mendukung program pengelolaan irigasi.

- Setelah dilaksanakannya updating e-PAKSI (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) ditahun 2025 banyak ditemukannya daerah irigasi yang rusak sedang dan berat
- Faktor hidrometeorologi juga mempengaruhi karena dengan intensitas curah hujan yang tinggi dan ditambah lagi tanah longsor sehingga membuat jaringan daerah irigasi kewenangan kabupaten banyak yang mengalami kerusakan.
- kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2025

No.	Lokasi D.I. per kecamatan	Panjang saluran Irigasi (M)	Total Panjang saluran Irigasi Kondisi Baik (M)	Ket
1	Bolaang Timur	8.766,72	8.766,72	
2	Bolaang	9.099,21	5.466,50	
3	Sangtombolang	4.327	3.042	
6	Lolayan	65.047,80	26.736,70	
7	Dumoga	12.929	2.299	
11	Dumoga Utara	1.463	1.463	
12	Poigar	10.063,20	2.290	
	Jumlah	111.695,93	50,066,92	

b. Hambatan

- Tidak adanya anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Bidang Irigasi Tahun Anggaran 2025, sehingga mempengaruhi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.
- Masih ada kurangnya kesadaran dari masyarakat tertentu untuk pemeliharaan irigasi dikarenakan penolakan masyarakat untuk dilaksanakannya pekerjaan pemeliharaan daerah irigasi.
- Minimnya anggaran yang dialokasikan sehingga dalam pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten sangat kurang.

c. Alternative solusi yang telah dilakukan

- sebelum pelaksanaan pekerjaan untuk pemeliharaan irigasi maka akan disampaikannya pemberitahuan pekerjaan kepada masyarakat baik tingkat kecamatan, desa dan masyarakat yang berada di kawasan daerah irigasi.
- Permohonan pengajuan penambahan anggaran untuk Pengelolaan jaringan irigasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah dilaksanakan.

2.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	sasaran	indikator	% capaian kinerja	% Capaian anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	43,83	97,75	-53,92

Bila dilihat dari capaian kinerja memang untuk indikator Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik adalah 43,83% dengan tingkat efisiensi -53,92%. Hal ini disebabkan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka anggaran yang ada sangat minim sehingga capaian kinerja tidak efisien. Di samping itu dukungan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 bidang irigasi tidak di approve oleh kementerian terkait dan yang menyebabkan tingkat efisiensi untuk capaian kinerja dari penyerapan anggaran dibawah atau minus.

2.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Program dan kegiatan yang menjadi penunjang untuk pencapaian Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran		Capaian (%)
			Pagu	Realisasi	
A.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Bangunan Sumber Daya Air yang di Kelola	2.438.399.526	2.366.827.623	97,06
1.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Panjang Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	2.415.428.526	2.361.035.623	97,75

2.2 Pencapaian Sasaran Meningkatnya layanan air minum dengan indikator persentase rumah tangga berakses air minum layak



Pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator rumah tangga berakses air minum layak, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AML = \frac{\text{Jumlah kumulatif rumah tangga yang terlayani air minum melalui SPAM}}{\text{Total rumah tangga di seluruh kabupaten}} \times 100$$

$$AML = \frac{43.281}{62.773} \times 100 = 68,95$$

2.2.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rumah tangga berakses air minum layak	74,70	68,95	92,30%

Jumlah rumah tangga berakses air minum layak sampai dengan tahun 2025 sebanyak 43.281 rumah tangga dan persentase realisasi sebesar 68,95% dengan capaian dari target mencapai 92,30%.



2.2.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	73,20%	68,63%	93,76%	74,70%	68,95%	92,30%

Capaian kinerja untuk tahun 2025 adalah 92,30% dengan realisasi kinerja 68,95%. Sedangkan untuk tahun 2024 capaian kinerja 93,76% yang artinya capaian kinerja untuk tahun 2025 menurun dari capaian kinerja di tahun 2024. Hal ini disebabkan naiknya target kinerja di tahun 2025 serta dengan anggaran yang minim dalam pelaksanaan pembangunan rumah tangga yang berakses air minum layak.



2.2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra 2026	
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase rumah tangga berakses air minum layak	75,83	-	-	95,63	93,76	74,70	68,95	92,30	76,20	90,49

Capaian kinerja hanya menunjukkan sampai pada tahun 2020 dikarenakan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020 sehingga tahun 2021 hingga 2022 tidak ada target yang ditetapkan. Indikator kinerja rumah tangga berakses air minum bersih masuk pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bolaang Mongondow RPD pada Tahun 2023-2026. Persentase rumah tangga berakses air minum layak untuk tahun 2025 menunjukkan realisasi 68,95% dengan capaian kinerja 92,30%. Capaian kinerja tersebut jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “SANGAT BERHASIL”.

Capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra mencapai 90,49% untuk Persentase rumah tangga berakses air minum layak. Capaian ini hampir sesuai dengan target awal selama lima tahun kedepan dimana meningkatnya layanan air minum diharapkan stabil selama lima tahun kedepan dan capaian kinerja ini dapat didukung oleh Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum



2.2.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tahun	Capaian rumah tangga berakses air minum layak (%)		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
2024	93,22	94,86	92,30

Persentase rumah tangga berakses air minum layak nasional yang terbangun hingga tahun 2025 mencapai 93,22% dan untuk capaian tingkat provinsi sulawesi utara mencapai 94,86% sedangkan untuk kabupaten 92,30%.

2.2.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Analisis Penyebab Keberhasilan

- Adanya dukungan serta anggaran dana dari desa dalam pembangunan air minum.
- Adanya program dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk pengelolaan dan pengembangan sistem air minum di desa.
- Adanya program Kementerian PUPR Direktorat Cipta Karya untuk program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
- Kondisi rumah tangga berakses air minum layak berdasarkan isu-isu strategis bidang cipta karya maka Penyediaan infrastruktur perkotaan untuk air bersih dapat ditingkatkan.

- Keberhasilan rumah tangga berakses air minum layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Tahun 2024

No.	kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Berakses air minum layak	Ket
1	Poigar	5.638	1.979	
2	Bolaang Timur	3.156	2.390	
3	Bolaang	5.476	3.918	
4	Lolak	7.967	4.934	
5	Sangtombolang	3.092	3.051	
6	Bilalang	2.062	1076	
7	Passi Barat	3.443	2.952	
8	Passi Timur	4.936	2.627	
9	Lolayan	6.934	4.380	
10	Dumoga	3.801	3.107	
11	Dumoga Timur	4.936	2.782	
12	Dumoga Tengah	3.464	2.649	
13	Dumoga Barat	4.479	3.417	
14	Dumoga Utara	2.599	2.198	
15	Dumoga Tenggara	2.653	1.821	
	Jumlah	62.773	43.281	

b. Hambatan

- Kurangnya alokasi anggaran untuk kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
- Masih ada kurangnya kesadaran dari masyarakat tertentu untuk pembangunan sistem penyediaan air minum dikarenakan penolakan masyarakat untuk dilaksanakannya pekerjaan.

c. Solusi yang dilakukan

- Melakukan permohonan penambahan anggaran lewat tim anggaran pemerintah daerah
- Melakukan sosialisasi untuk pentingnya pembangunan SPAM kepada masyarakat lewat musrenbang desa/kecamatan untuk diusulkan ke tingkat musrenbang kabupaten.

2.2.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	sasaran	indikator	% capaian kinerja	% Capaian anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya Layanan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	92,30	91,03	1,27

Bila dilihat dari capaian kinerja untuk indikator Persentase rumah tangga berakses air minum layak adalah 92,30% dengan tingkat efisiensi 1,27%. Tingkat analisis efisiensi ini plus 1,27 disebabkan adanya dukungan diluar dari dinas PUPR mulai dari kementerian Pekerjaan Umum dengan program Pamsimas, Perusahaan Daerah Air Minum dan Dana desa sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

2.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Program dan kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan untuk pencapaian persentase rumah tangga berakses air minum layak adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		Capaian (%)
			Pagu	Realisasi	
A	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jaringan Instalasi Air Minum Terpasang dalam kondisi Baik	2.743.342.493	2.497.354.215	91,03
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	Akumulasi Rumah Tangga yang memiliki akses layanan air minum yang layak	2.743.342.493	2.497.354.215	99,93

2.3 Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas layanan sanitasi dengan indikator rata-rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase



Pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator sasaran Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$SRT = \frac{(\text{Persentase layanan penyediaan sistem air limbah} + \text{persentase layanan jaringan drainase kabupaten})}{2}$$

$$SRT = (57,21 + 35,15) / 2 = 46,18$$

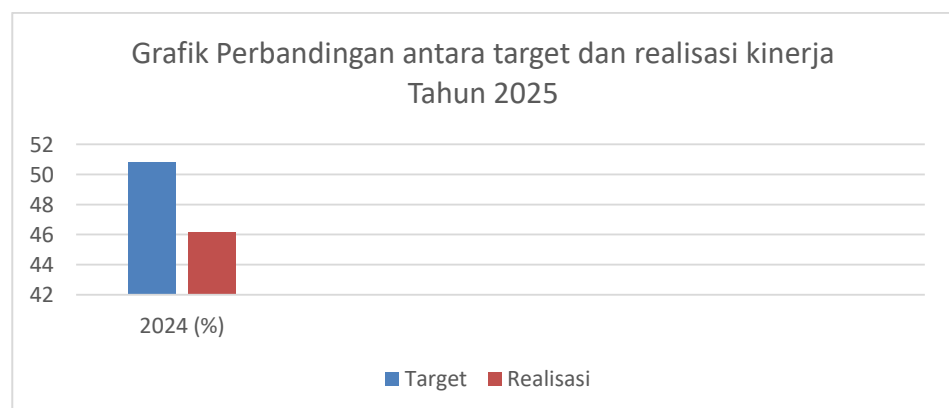
2.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase	50,8	46,18	90,91

Realisasi Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase untuk tahun 2025 adalah 46,18 dengan capaian 90,91%. Capaian ini menurun dari tahun sebelumnya.



2.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase	49,5	47,80	96,57	50,8	46,18	90,91

Realisasi kinerja untuk tahun 2025 adalah 46,18% dengan Capaian kinerja 90,91%, menurun dari capaian tahun 2024 yaitu 96,57%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan target pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta minimnya anggaran.



2.3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target	
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase	55,35	33,55	31,50	96,11	96,57	50,8	46,18	90,91	52	88,81

Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase Tahun 2025 menunjukkan realisasi 46,18% dengan capaian Kinerja 90,91%. Sedangkan untuk tahun 2024 Realisasi Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai 47,80% dengan capaian kinerja 96,57%. Capaian kinerja tahun 2025 jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “SANGAT BERHASIL”. Keberhasilan ini tercapai karena Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan adanya perubahan target untuk Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan capaian kinerja ini didukung oleh program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah. Capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra mencapai 88,81% untuk Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase. Capaian ini sesuai dengan target awal selama lima tahun kedepan dan diharapkan stabil selama lima tahun kedepan.



2.3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tahun	Capaian layanan akses sanitasi rumah tangga (%)		
	Nasional	Provinsi	Kabupaten
2025	85,37	87,72	90,91

Layanan akses sanitasi rumah tangga layak nasional adalah 85,37% sedangkan diprovinsi sulawesi utara untuk capaian layanan akses sanitasi rumah tangga hingga tahun 2025 adalah 87,72% sedangkan capaian layanan akses sanitasi rumah tangga untuk kabupaten dari capaian awal 96,57% menjadi 90,91% atau 88,81% dari capaian akhir target.

2.3.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Analisis Penyebab Keberhasilan

- Adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), sehingga dengan sendirinya masyarakat melakukan pembangunan secara mandiri.
- Adanya perubahan target untuk Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 untuk layanan akses sanitasi rumah tangga maka dapat sehingga dapat mencapai kinerja program pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah.
- Kondisi layanan akses sanitasi rumah tangga berdasarkan isu-isu strategis bidang cipta karya maka Penyediaan infrastruktur perkotaan untuk sanitasi dan Penyediaan Prasarana Dasar Permukiman drainase dapat ditingkatkan.
- Keberhasilan layanan akses sanitasi rumah tangga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Layanan Akses Sanitasi Rumah Tangga Tahun 2025

No.	kecamatan	Jumlah Rumah	Rumah Tangga Bersanitasi	Ket
1	Poigar	5071	2153	
2	Bolaang Timur	2970	1288	
3	Bolaang	4938	2219	
4	Lolak	7185	3308	
5	Sangtombolang	2524	1344	
6	Bilalang	1794	870	
7	Passi Barat	2827	1852	
8	Passi Timur	2716	1445	
9	Lolayan	5679	3214	
10	Dumoga	3459	923	
11	Dumoga Timur	4462	4114	
12	Dumoga Tengah	3121	1101	
13	Dumoga Barat	3762	3611	
14	Dumoga Utara	2595	3011	
15	Dumoga Tenggara	2376	1286	
	Jumlah	55.479	31.739	

- b. Hambatan
 - Kurangnya anggaran dalam pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
 - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan stunting serta masih banyaknya masyarakat yang BAB di sungai
- c. solusi yang telah dilakukan
 - melakukan peningkatan akses sanitasi melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara
 - Melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan air limbah domestik

2.3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	sasaran	indikator	% capaian kinerja	% capaian anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya kualitas layanan sanitasi	Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase	90,91	99,98	-9,07

Tingkat efisiensi memang minus 9,07% dikarenakan tidak adanya sisa hasil dari tender paket pekerjaan yang dilaksanakan maupun menambahkan anggaran pada Perubahan APBD TA. 2025 dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

2.3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Program dan kegiatan yang menjadi penunjang keberhasilan untuk pencapaian Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Anggaran		Capaian (%)
			Pagu	Realisasi	
A.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase layanan penyediaan sistem air limbah	3.000.920.255	3.000.276.822	99,98
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Akumulasi Rumah Tangga yang memiliki akses layanan limbah yang layak	3.000.920.255	3.000.276.822	99,97
B	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase layanan Jaringan Drainase Kabupaten	100,000,000	0,00	0,00
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi panjang sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kondisi baik	100,000,000	0,00	0,00

2.4 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Konstruksi dengan indikator Persentase Penyedia Jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi



Pengukuran capaian kinerja sasaran dengan indikator sasaran Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Memenuhi Standar Kualifikasi, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKB = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga konstruksi}} \times 100\%$$

$$IKB = \frac{103}{185} \times 100\% = 55,68\%$$

2.4.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	100	55,68	55,68

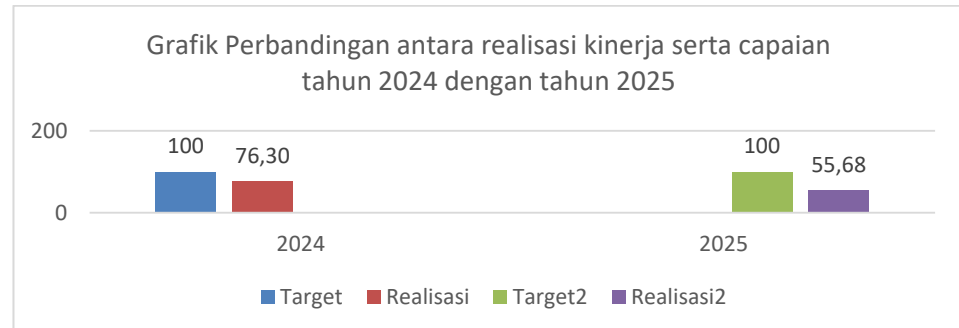
Realisasi Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi untuk tahun 2025 sebesar 55,68% dengan capaian 55,68%.



2.4.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	100	76,30	76,30	100	55,68	55,68

Realisasi kinerja untuk tahun 2025 adalah 55,68% dengan Capaian kinerja 55,68%. Hal ini belum tercapai dikarenakan untuk peserta pelatihan belum tercapai dari target yang ditentukan.

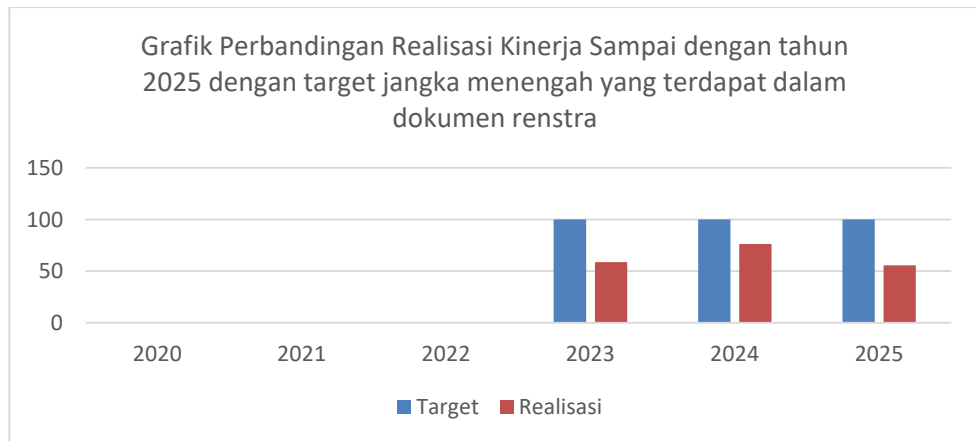


2.4.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target akhir renstra	
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	-	-	-	58,82	76,30	100	55,68	55,68	100	55,68

Persentase indikator penyedia jasa jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi di Tahun 2025 menunjukkan realisasi 55,68%, artinya capaian di tahun 2025 belum mencapai target yang ditentukan. Capaian kinerja tersebut jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “CUKUP BERHASIL”. Capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra 2026 mencapai 55,68% untuk Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi. Capaian ini perlu ditingkat sesuai dengan target awal untuk mencapai target lima tahun kedepan.



2.4.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tahun	Capaian tenaga kerja konstruksi terlatih mempunyai sertifikat keterampilan (orang)		
	Tenaga terlatih Nasional	Tenaga terlatih Provinsi	Tenaga terlatih Kabupaten
2025	538.038	6.735	103

Sumber: Konstruksi Dalam Angka

Tenaga kerja konstruksi yang terlatih mempunyai sertifikat keterampilan secara nasional sebanyak 538.038 orang. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 6.735 orang dan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah 103 Orang.

Untuk kabupaten Bolaang Mongondow sendiri capaiannya sangat minim ini dikarenakan kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang diadakan di Kabupaten Bolaang Mongondow baru dilaksanakan pada Tahun 2023 sehingga capaian untuk tenaga terampil baru sekitar 103 orang.

2.4.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Hambatan

- Kurangnya peserta yang mengikuti pelatihan sementara salah satu syarat dalam pelaksanaan pelatihan harus 50 peserta/gelombang untuk bisa dilaksanakan pelatihan
- Anggaran yang tersedia hanya bisa dilaksanakan untuk 1 gelombang sementara dalam target yang ditentukan adalah 185 orang untuk tahun 2025

b. alternative solusi yang telah dilakukan

- memberikan informasi kepada masyarakat terlebih kepada penyedia jasa agar dapat mengikuti pelatihan
- Permohonan penambahan anggaran telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

2.4.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	sasaran	indikator	% capaian kinerja	% penyerapan anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	55,68	0,00	-55,68

Bila dilihat dari capaian kinerja memang untuk indikator Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi hanya pada 55,68% dengan tingkat efisiensi -55,68. Hal ini disebabkan kegiatan tidak dilaksanakan sehingga tidak ada penyerapan anggaran, adapun dalam pelaksanaan pelatihan tenaga terampil sepenuhnya dilaksanakan oleh ASN di dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sehingga turut membantu dalam pelaksanaan pelatihan tenaga terampil untuk peningkatan kualitas penyedia jasa konstruksi.

2.4.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Program dan kegiatan yang menjadi penunjang untuk pencapaian persentase penyedia jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi	
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	59.858.490	0,00	0,00

2.5 Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan Pengendaliannya sesuai Peraturan yang Berlaku dengan indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	75	81,59	108,79

Pengukuran capaian kinerja sasaran :
 “Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan Pengendaliannya sesuai Peraturan yang Berlaku “ dengan indikator sasaran Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$SRT = \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukkan}} \times 100\%$$

$$SRT = \frac{2685,43}{3291,49} \times 100\% = 81,59$$

2.5.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	75	81,59	108,79

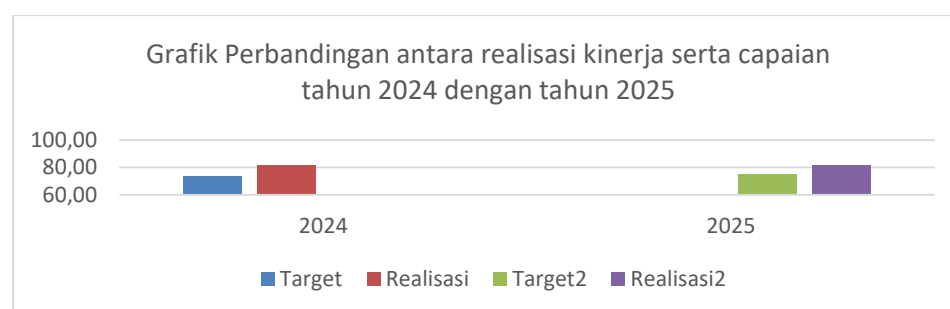
Realisasi kinerja kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW untuk tahun 2025 adalah 81,59% dengan capaian 108,79%. Capaian tahun 2025 menurun dari tahun sebelumnya.



2.5.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	74	81,59	110,26	75	81,59	108,79

Realisasi kinerja untuk tahun 2025 adalah 81,59% dengan Capaian Indikator 108,79% menurun dari capaian indikator tahun 2024 yaitu realisasi kinerja 81,59% dengan capaian 110,26%, capaian ini belum sesuai dengan target awal.



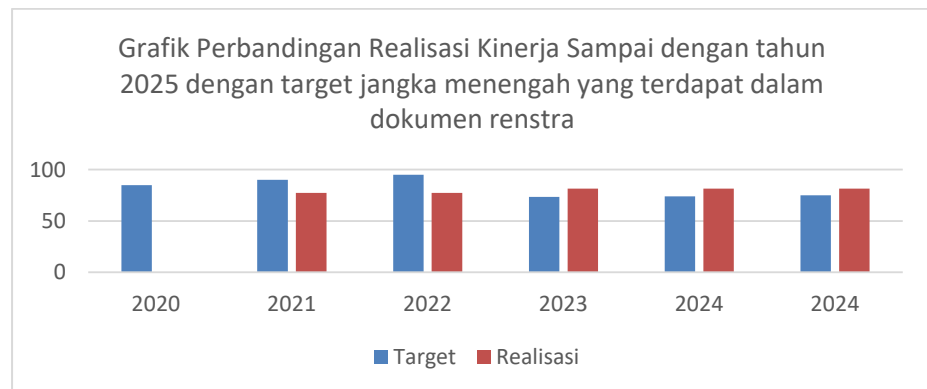
2.5.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025			Capaian Kinerja Terhadap Target	
						Target	Realisasi	%	Target	Realisasi
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	0	77,47	77,47	111,01	110,26	75	81,59	108,79	75,00	108,79

Persentase indikator sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten di Tahun 2025 menunjukkan realisasi 81,59%. Capaian ini memang melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) telah berdasarkan RTRW sehingga dapat mencapai kinerja yang telah ditentukan. Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten jika kita nilai dengan skala ordinal pada pengukuran kinerja masuk pada kategori “SANGAT BERHASIL”.

Capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra mencapai 108,79% untuk kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten. Capaian ini sesuai dengan target awal selama lima tahun kedepan karena dan diharapkan dapat bertahan selama empat tahun kedepan. Capaian kinerja ini dapat terlaksana melalui program pendukung yaitu Penyelenggaraan Penataan Ruang.



2.5.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

a. Analisis Penyebab Keberhasilan

Meskipun belum diperdakkannya Revisi RTRW 2014-2034 namun dengan adanya revisi RTRW ini, pemanfaatan ruang sudah sesuai dengan peruntukannya.

b. Kegagalan/Penurunan Kinerja

Masih adanya kurang kontrol pengawasan manajemen sehingga masih terdapat bangunan/lahan liar yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

c. Alternative solusi yang dilakukan

Saat ini dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan harus sesuai dengan RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow dan pendaftaran perizinan melalui aplikasi SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)

2.5.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	sasaran	indikator	% capaian kinerja	% capaian anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan Pengendaliannya sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	108,79	50,68	58,11

Kesesuaian Kegiatan Pemafaatan Ruang (KKPR) di Kabupaten Bolaang Mongondow telah dapat dilaksanakan berdasarkan dokumen pada Revisi RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya selain ditunjang dengan anggaran akan tetapi menjadi syarat mutlak dalam pengurusan izin mendirikan bangunan.

2.5.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang menjadi penunjang untuk pencapaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupten adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator	Anggaran		Capaian %
			Pagu	Realisasi	
A.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen Kebijakan Penyesuaian RTRW Kabupaten dengan RTRW Provinsi dan Nasional	383.022.598	207.810.182	54,26
1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	319.950.400	162.159.334	50,68

3. PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 3.1.1 berikut:

Tabel Capaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2025			Capaian
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatkan Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Perlindungan Daerah Aliran Sungai	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	86	37,69	43,83	Tidak Berhasil
2	Meningkatnya Capaian Universal Acces Dibidang Air Minum dan Sanitasi	Meningkatnya Layanan Air Minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	74,70	68,95	92,30	Sangat Berhasil
		Meningkatnya kualitas layanan sanitasi	Rata – rata persentase layanan akses sanitasi rumah tangga pada bidang pengelolaan air limbah dan drainase	50,8	46,18	90,91	Sangat Berhasil
3	Mewujudkan Penyedia Jasa Konstruksi yang Memadai	Meningkatnya Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	100	55,68	55,68	Tidak Berhasil
4	Optimalisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang dan Pengendaliannya sesuai Peraturan yang Berlaku	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten	75	81,59	108,79	Sangat Berhasil

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD Tahun 2025 dengan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1. Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran belanja dari DPPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 56.932.707.828,00,- Naik 30,77% dibanding anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 sebesar Rp. 39.416.652.704,40,-. Belanja operasi yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari APBD perubahan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 21.564.323.049,00,- naik 19,52% dibanding anggaran yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 sebesar Rp. 17.354.190.525,40,-.

Jumlah anggaran Belanja modal yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025 sebesar Rp. 35.368.384.779,00,- atau turun sebesar 37,62% dibanding anggaran Belanja Langsung tahun 2024 lalu sebesar Rp. 22.062.462.179,00,-.

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 90,36%. Capaian realisasi ini menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 94,79%. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 mencapai 97,85%. Capaian ini meningkat dari capaian tahun lalu yang mencapai 96,42%.

Perbandingan realisasi anggaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Jenis Belanja	2024			2025		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi	17.354.190.525,40	16.450.745.021	94,79%	21.564.323.049	19.486.058.582	90,36
Belanja Modal	22.062.462.179	21.271.612.171	96,42%	35.368.384.779	34.611.253.876	97,85
Jumlah	39.416.652.704,40	37.722.357.192	95,70%	56.932.707.828	54.097.312.458	95,01

2. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Capaian kinerja pada realisasi anggaran untuk masing-masing Program/Kegiatan ditunjukkan seperti pada Tabel di Bawah :

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	PENYEDIAAN DANA	REALISASI	%	KET (SISA ANGGARAN)
			Rp	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.463.248.493	13.628.515.877	88,13	1.834.732.616
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.426.230.884	7.538.552.164	89,47	887.678.720
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	8.145.677.570	7.303.156.591	89,66	842.520.979
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DAU	250.922.047	208.024.124	82,90	42.897.923
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	29.631.267	27.371.449	92,37	2.259.818
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah		397.641.546	367.590.829	92,44	30.050.717
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.737.478	6.217.400	92,28	520.078
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DAU	15.037.281	13.909.344	92,50	1.127.937
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DBH	375.866.787	347.464.085	92,44	28.402.702
III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.729.731.389	5.250.627.820	91,64	479.103.569
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DBH	1.694.106.499	1.637.219.819	96,64	56.886.680
2	Pengadaan Alat Besar	PAD	3.850.000.000	3.438.780.000	89,32	411.220.000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	40.624.890	37.410.001	92,09	3.214.889
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DAU	145.000.000	137.218.000	94,63	7.782.000
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		331.250.000	315.740.000	95,32	15.510.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	30.750.000	26.240.000	85,33	4.510.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	300.500.000	289.500.000	96,34	11.000.000
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		578.394.674	156.005.064	26,97	422.389.610
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU	120.462.950	111.435.450	92,51	9.027.500
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	10.307.577	2.150.000	20,86	8.157.577

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	PENYEDIAAN DANA	REALISASI	%	KET (SISA ANGGARAN)
			Rp	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DAU	350.714.147	11.400.000	3,25	339.314.147
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	96.910.000	31.019.614	32,01	65.890.386
B	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		2.438.399.526	2.366.827.623	97,06	71.571.903
I	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		22.971.000	5.792.000	25,21	17.179.000
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU	22.971.000	5.792.000	25,21	17.179.000
II	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		2.415.428.526	2.361.035.623	97,75	54.392.903
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DBH	1.664.817.500	1.625.731.287	97,65	39.086.213
2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	DAU	250.000.000	249.735.061	99,89	264.939
3	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	DBH	345.145.077	333.000.000	96,48	12.145.077
4	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	DAU	155.465.949	152.569.275	98,14	2.896.674
C	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		2.743.342.493	2.497.354.215	91,03	245.988.278
I	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>		2.743.342.493	2.497.354.215	91,03	245.988.278
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pendapatan Bagi Hasil	721.899.493	574.504.752	79,58	147.394.741
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DBH	500.000.000	500.000.000	100,00	-
3	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1.521.443.000	1.422.849.463	93,52	98.593.537
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		3.000.920.255	3.000.276.822	99,98	643.433
I	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		3.000.920.255	3.000.276.822	99,98	643.433

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	PENYEDIAAN DANA	REALISASI	%	KET (SISA ANGGARAN)
			Rp	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Penerimaan Pembiayaan	2.754.462.000	2.754.300.000	99,99	162.000
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DAU	246.458.255	245.976.822	99,80	481.433
E	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		100.000.000	-	0,00	100.000.000
I	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		100.000.000	-	0,00	100.000.000
1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	DAU	100.000.000	-	0,00	100.000.000
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		32.743.915.973	32.459.995.533	99.13	283.920.440
I	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		32.743.915.973	32.459.995.533	99.13	283.920.440
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Pendapatan Bagi Hasil	102.034.641	100.395.060	98,39	1.639.581
2	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	DBH	205.801.708	203.260.610	98,77	2.541.098
3	Pemeliharaan Berkala Jalan	Penerimaan Pembiayaan	9.391.064.412	9.260.231.870	98,61	130.832.542
4	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	DBH	113.234.902	109.387.600	96,60	3.847.302
5	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pendapatan Asli Daerah	14.352.402.130	14.352.402.130	100,00	-
6	Rehabilitasi Jembatan	DBH	1.435.132.022	1.428.788.978	99,56	6.343.044
7	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	DBH	250.000.000	224.669.550	89,87	25.330.450
8	Rehabilitasi Jalan	DBH	2.700.720.826	2.653.203.685	98,24	47.517.141
9	Pemeliharaan Rutin Jalan	DBH; Opsen PKB	4.193.525.332	4.127.656.050	98,43	65.869.282
G	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		59.858.490	-	0,00	59.858.490
I	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		59.858.490	-	0,00	59.858.490
1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	DAU	59.858.490	-	0,00	59.858.490

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SUMBER DANA	PENYEDIAAN DANA	REALISASI	%	KET (SISA ANGGARAN)
			Rp	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		383.022.598	207.810.182	54,26	175.212.416
I	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>		<i>319.950.400</i>	<i>162.159.334</i>	<i>50,68</i>	<i>157.791.066</i>
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	DBH	319.950.400	162.159.334	50,68	157.791.066
II	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>63.072.198</i>	<i>45.650.848</i>	<i>72,38</i>	<i>17.421.350</i>
1	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pendapatan Bagi Hasil	63.072.198	45.650.848	72,38	17.421.350
	Jumlah		56.932.707.828	54.160.780.252	95,13	2.771.927.576

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian realisasi kinerja keuangan antara lain :

- Adanya penambahan anggaran yang dilaksanakan pada perubahan APBD yang tidak terealisasi 100% dikarenakan waktu pekerjaan yang singkat sehingga beresiko pada pekerjaan.
- Adanya sub kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali dikarenakan beresiko tidak ada akan selesai karena dianggarkan pada APBD Perubahan.
- Adanya Pembayaran retensi 5% dari pekerjaan fisik tidak direalisasikan dikarenakan belum adanya jaminan pemeliharaan dari pekerjaan.
- Adanya anggaran sisa hasil tender dari paket lelang pekerjaan konstruksi yang tidak digunakan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maupun di dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow 2023-2026 yang diamanahkan masyarakat, stakeholder, dan pimpinan di atasnya.

1. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 ialah **Cukup Berhasil**. Sedangkan untuk realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 mencapai 95,01%, dengan realisasi belanja operasi sebesar 90,36% dan realisasi belanja modal sebesar 97,85%.

2. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHANNYA

Dalam upaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih tidak mengalami kendala yang signifikan dikarenakan melihat dari capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada kategori **Cukup Berhasil**. Akan tetapi perlu adanya peningkatan dalam pencapaian kinerja yang menjadi pekerjaan rumah untuk di tuntaskan, seperti pada bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi sesuai dengan rencana target capaian yang di patok dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2025 pada indikator Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi dengan realisasi kinerja sebesar 55,68% sedangkan capaian kinerja tahun 2024 hanya 76,30%. Hal ini terjadi karena minimnya anggaran APBD dan dana operasional serta kurangnya minat penyedia jasa untuk ikut dalam pelatihan tenaga jasa konstruksi.

Hal yang sama untuk Bidang Sumber Daya Air (SDA), perlu adanya peningkatan untuk kualitas jaringan irigasi secara berkala. Apalagi setelah dilaksanakannya updating e-Paksi (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi), dimana terdapat masih banyaknya jaringan daerah irigasi yang rusak sedang dan berat sehingga capaian kinerja sasaran untuk kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik yaitu **Tidak Berhasil** dan selain itu juga penganggaran yang minim untuk Progam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Untuk Bidang Cipta Karya meskipun secara umum capaian kinerja sasaran ialah **Sangat Berhasil**, akan tetapi masih saja ada permasalahan yaitu minimnya anggaran untuk menunjang program pengelolaan dan pengembangan air limbah dan air minum, mengingat untuk air minum dan air limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menajdi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak di peroleh setiap warga negara secara minimal dimana Pelayanan dasar yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan air minum dan penyediaan pengelolaan air limbah domestik.

Permasalahan selanjutnya juga terdapat pada Bidang Tata Ruang yaitu sampai dengan tahun 2024 ini revisi RTRW Tahun 2014-2034 belum juga diperdakan sehingga dalam peningkatan investor untuk masuk ke Kabupaten Bolaang Mongondow masih terkendala dengan RTRW Kabupaten dan dalam pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang sangat minim anggaran ini dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 untuk program/kegiatan Penyelenggaraan penataan ruang tidak menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya bidang Pekerjaan Umum.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Untuk Bidang Sumber Daya Air

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Daerah Irigasi agar kiranya dapat diprioritaskan dalam APBD 2026 karena dapat meningkatkan kualitas jaringan irigasi selaku penopang untuk swasembada pangan yang termasuk dalam salah satu Asta Cita Presiden Republik Indonesia selain itu untuk tahun anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak mendapat approve Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang irigasi dari kementerian terkait.
2. Penjelasan lebih lanjut kepada SKPD terkait tentang batas-batas wilayah pekerjaan yang menjadi kewenangan masing-masing.

B. Untuk Bidang Cipta Karya

1. Prioritas pembangunan Desa yaitu pemenuhan hak kebutuhan dasar yaitu Air Minum dan Sanitasi
2. Perlunya mengubah pandangan dan kebiasaan masyarakat untuk perlunya hidup sehat

3. Prioritas penganggaran baik dari pemerintah, swasta dan Dana desa dari masyarakat untuk infrastruktur dasar
 4. Tambahan pendanaan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan dasar Air Minum dan Sanitasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- C. Untuk Bidang Bina Marga
1. Melakukan perhitungan kembali terhadap survey perencanaan jalan yang masuk pada asset kabupaten.
 2. Secepatnya menuntaskan ruas jalan yang masih rusak berat yang termuat pada Surat Keputusan Jalan Nomor 153 Tahun 2023.
- D. Untuk Bidang Tata Ruang
1. Koordinasi lintas SKPD untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
 2. Upaya pengendalian diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan tupoksi
 3. Menyurat ke Pemerintah Kecamatan untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan tata ruang.
 4. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah (RTRW)
 5. Penambahan anggaran untuk mempercepat penetapan Peraturan Daerah tentang Revisi RTRW Tahun 2014-2034

Dengan dilakukannya langkah-langkah perbaikan diatas, diharapkan kedepannya akan berdampak pada tercapainya semua sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja maupun Renstra Dinas PUPR tahun 2023-2026.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERJANJIAN
KINERJA TAHUN
2025

LAMPIRAN II

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025

LAMPIRAN III

RENCANA

AKSI

TAHUN 2025

LAMPIRAN IV

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2025

LAMPIRAN V

PENGUKURAN KINERJA

KEGIATAN

TAHUN 2025

LAMPIRAN VI

PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2025